



@SES 134

Orasi Budaya:

PROKLAMASI KEMERDEKAAN ADALAH PROKLAMASI BUDAYA

Orasi Budaya di ISI Surakarta
Surakarta, 7 Maret 2017
(Pendapat Pribadi)

Sri-Edi Swasono

(Guru Besar Universitas Indonesia,
Guru Besar Luar Biasa Universitas Islam Negeri/UIN SH Jakarta,
Ketua Dewan Pertimbangan ISI Surakarta,
Ketua Umum Majelis Luhur Tamansiswa)

UNIVERSITAS INDONESIA
2017



@SES 134

**Orasi Budaya:
PROKLAMASI KEMERDEKAAN
ADALAH
PROKLAMASI BUDAYA
Sri-Edi Swasono**

Pengantar: Embrio Nasionalisme Indonesia

Keindonesiaan atau kenasionalan Indonesia tergambar dari tujuan suci Kemerdekaan Indonesia, yaitu:

"...Mendirikan pemerintahan negara yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial..." (Pembukaan UUD 1945).

Istilah "kenasionalan" yang di masa lampau dikemukakan Mohammad Hatta, Ki Hadjar Dewantara dan Prof. Soepomo, bagi saya istilah ini saya artikan sebagai "keindonesiaan". Istilah "keindonesiaan" menggambarkan *die Gestaltung*¹⁾ Indonesia,

¹⁾ Istilah *Gestalt* sulit dicari padanannya dalam bahasa Inggris maupun Prancis. Dalam bahasa Indonesia barangkali "perangai", "corak" atau bahasa Jawa "guwoyo". Lebih dari *Gestalt*, keindonesiaan adalah Indonesia dalam: *nature*, perangai, tampang, *conscience*, kesadaran, identitas, perilaku, cita-cita, *nationhood*, *socio-cultural specifics*.

Cukup lama kita tertipu oleh diri kita sendiri atas kelengahan kultural terhadap Tanah-Air kita. *Gestaltung* Indonesia harus dapat diungkap oleh kita sendiri secara strategis, yang tentu tidak lagi mengabaikan konsepsi peran dominan kita sebagai negara kepulauan ataupun sebagai negara maritim, di mana berbagai sukubangsa membentuk pergaulan nasional berdasar kebersamaan dan asas kekeluargaan secara kohesif. Tanah Air Indonesia berada pada posisi silang dan memberikan jasa kepada bangsa-bangsa lain di dunia yang membentuk sikap outward dan bersahabat. Sekitar 60 persen perdagangan global melewati laut kita (Harjono K, 2014), dengan nilai perdagangan sekitar

sebagai gambaran kristalisasi, corak atau pun perangai Indonesia. Barangkali di dalam bahasa Inggris istilah “keindonesiaan” ini dapat disebutkan sebagai “*Indonesianism*” sebagaimana masyarakat Amerika mengungkapkan-nya dengan istilah mereka sendiri “*Americanism*”. CNN mengintip Eropa dengan dinamika Uni Eropa-nya sebagai “*Europeanism*”.

Kemerdekaan Indonesia bukan tanpa wujud, kemerdekaan Indonesia berwujud keindonesiaan, yang terbentuk oleh berbagai doktrin. Doktrin yang utama adalah doktrin multi-etnikalisme dan multikulturalisme yang berupa tuah sakral bagi Indonesia: *Bhinneka Tunggal Ika – Tan Hanna Dharma Mangrwa*, sebagai embrio nasionalisme Indonesia, yang akan dibahas lebih lanjut di depan.

Keterjajahan dan Subordinasi Sosial

Pedihnya keterjajahan Indonesia dengan segala kesulitan kehidupan rakyat Hindia-Belanda antara lain digambarkan oleh Mohammad Hatta di berbagai tulisannya di majalah *Daulat Rajat* (1931-1934).²⁾ Protes keras Mohammad Hatta terhadap pemerintah Belanda dan Hindia-Belanda melalui *pleidooi*-nya, di depan mahkamah pengadilan Belanda di Den Haag (1928), disampaikan dengan judul *Indonesië Vrij (Indonesia Merdeka)*. Demikian pula *pleidooi*-nya Ir. Soekarno yang keras di pengadilan Bandung (1930) dibacakan dengan judul *Indonesië Klacht-Aan (Indonesia Menggugat)*.

Dalam *Regering Reglement* 1925, yang lebih mengukuhkan *reglement* sebelumnya, menetapkan strata sosial

USD 5,3 trilyun, dari jumlah ini USD 1,2 trilyun milik AS (Connie R. Bakrie, 2014) dan tidak kurang dari 70.000 kapal asing pertahun melewati perairan nasional kita (E Prasetyono, 2004).

²⁾ Dibukukan dalam ejaan baru oleh Tan-Sri Zulfikar Yusuf (ed.), *Bung Hatta: Daulat Rakyat dan Ekonomi Rakyat* (Yogyakarta: UST-Press, 2016).

penduduk Hindia-Belanda secara sangat diskriminatif. Penduduk Hindia-Belanda dibagi menjadi 3 golongan yaitu: *pertama*, kaum *European* (kulit putih) sebagai kelas teratas dengan segala kehormatan dan *privilege*-nya; *kedua*, kaum *Vreemde Oosterlingen* (Timur Asing) sebagai golongan kelas tengah (keturunan Cina, Arab, India); dan *ketiga*, kaum *Inlander* (orang pribumi) sebagai anak jajahan yang berada di kelas paling bawah. Diskriminasi sosial ini sangat menista dan menyakitkan hati kaum pribumi.

Penindasan kolonial oleh kaum imperialis Belanda sejak zaman VOC, zaman *Cultuurstelsel* dan selanjutnya, dalam bilangan abad yang sangat panjang, telah merusak kebebasan hidup, pergaulan hidup dan harkat-martabat kaum pribumi sebagai anak-negeri terjajah di Hindia-Belanda. Keterjajahan ini melumpuhkan kesadaran-diri dan harga-diri kaum *Inlander*, akibatnya tumbuh *minderwaardigheidscomplex* atau kompleks inferioritas dari kaum pribumi yang mengenaskan. Kejahatan sosial-kultural kaum penjajah ini mengurung kaum pribumi Indonesia dalam berbagai bentuk *social-political unfreedoms*.

Ketika Indonesia Merdeka maka diskriminasi sosial ini langsung dihapuskan dari segi politik, dan muncul sebagai Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi:

“Tiap-tiap warganegara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Mencerdaskan Kehidupan Bangsa

Dalam *Pembukaan* UUD 1945 seperti dikutipkan di atas, mengangkat secara eksplisit tujuan “mencerdaskan kehidupan bangsa”. Barangkali perlu saya kemukakan di sini bahwa menurut penegasan seorang *founding father*, anggota BPUPKI dan Wakil Ketua PPKI, “mencerdaskan kehidupan bangsa” adalah upaya mengangkat harkat-martabat kaum pribumi yang

tertindas kehidupan sosial-politik dan sosial-kultural-nya, agar mampu melepaskan “keinlanderan dan keminderannya”, dengan membangun *dignity*-nya sebagai bangsa. Dengan kata lain upaya “mencerdaskan kehidupan bangsa” berintikan konsepsi budaya, bukan sekedar merupakan upaya mencerdaskan otak bangsa yang hanya sebatas konsepsi biologis-genetika.³⁾

Tentulah peran pendidikan sangat penting dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Itulah sebabnya pendidikan tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan. Pendidikan merupakan upaya pembudayaan, membangun masyarakat baru setelah penjajahan, membentuk masyarakat yang *tertib*, *damai*, *salam* dan *bahagia* serta mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur (Ki Hadjar Dewantara). Mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mempertajam daya cipta, rasa dan karsa, menuju pembangunan manusia merdeka lahir dan batin, berbudi pekerti luhur, serta tinggi harkat dan martabat kemanusiaannya (*idem*). Dengan demikian misi pendidikan sebagai pencerahan budaya, demi mempertebal keindonesiaan (lihat catatan kaki 1).

Bhinneka Tunggal Ika – Tanhaha Dharma Mangrwa

Seperti telah dikemukakan di atas, doktrin multi-etnikalisme dan multikulturalisme yang berupa tuah sakral bagi

³⁾ Meutia Hatta mengemukakan dimensi mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai upaya yang tidak hanya melawan kebodohan sosial (*social foolishness*), tetapi juga melawan keterbelakangan sosial (*social backwardness*), feodalisme dan patronasi eksploitatif. Mencerdaskan kehidupan bangsa seperti ditegaskan oleh seorang *founding father*, adalah menghilangkan mentalitas inlander (yang saya artikan sebagai *underdog mentality*). Dengan mencerdaskan kehidupan bangsa, kita *tidak lagi* memelihara kemalasan, buta aksara, buta seni-budaya, buta peradaban, buta sejarah, buta geografi, buta spasial, buta ideologi, buta persatuan (kebangsaan), buta kebersamaan (kerakyatan), buta solidaritas, buta iptek, buta kedaulatan, buta kemartabatan, buta kesetaraan (termasuk kesetaraan *gender*, status), buta modernisasi, buta humanisme dan buta ketaqwaan. Dengan demikian mencerdaskan kehidupan bangsa adalah tuntutan modernisasi dan peradaban sebagai khalifatullah. Lihat Meutia Hatta, “Beberapa Catatan: Masukan untuk RUU Kebudayaan”, Masukan untuk Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia RUU tentang Kebudayaan, Komisi X DPR-RI. Jakarta, 23 Februari 2011.

Indonesia: *Bhinneka Tunggal Ika* – Tan Hanna Dharma Mangrwa, perlu penguraian sebagai berikut:

“Persatuan” seluruh sukubangsa ini hanya akan menjadi “persatén” (istilah Bung Hatta, 1932)⁴⁾ apabila tidak ditiupkan satu “ruh kebersamaan”. Satu ruh kebersamaan itu adalah Pancasila.

Kalimat bertuah Mpu Tantular *Bhinneka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa* – yang beraneka itu adalah satu, tidak ada loyalitas mendua, tidak ada kewarganegaraan ganda (hanya demi bangsa dan negara yang satu), adalah embrio nasionalisme (kebangsaan) Indonesia.

“Persatuan hati” menjadi kata kunci bagi persatuan Indonesia. “Kebersamaan” (bukan sekedar “keberdampingan” pra-kemerdekaan) adalah hasil Kemerdekaan yang kita proklamasikan.

Iniilah Indonesia, sangat beranekaragam, pluralistik dan multikulturalistik, namun satu, ikatan kesatuannya adalah Pancasila. Barangkali (seperti telah saya kemukakan sebelumnya) dapat diibaratkan sebagai pecahan $\frac{1}{2}$ yang tidak bisa dijumlah dengan $\frac{1}{3}$ dan $\frac{1}{4}$, kecuali setelah $\frac{1}{2}$ ditransformasi menjadi $\frac{6}{12}$ dan $\frac{1}{3}$ menjadi $\frac{4}{12}$, dan $\frac{1}{4}$ menjadi $\frac{3}{12}$ maka terjumlahlah penyatuan utuhnya. Seperduabelas adalah penyebut yang sama (*common denominator*) yang bisa menyatukan pembilang-pembilang, sebagaimana Pancasila berfungsi sebagai penyebut pemersatu (*unifying platform*) bagi pluralisme Indonesia. Artinya kita masing-masing saling berbeda-beda, namun satu dalam kebersamaan cita-cita dan paham bernegara sebagai

⁴⁾ “...Tidak ada kemerdekaan tanpa persatuan...dengan persatuan kita maksud persatuan bangsa, satu bangsa yang tidak dapat dibagi-bagi...di dalam pangkuan bangsa yang satu itu boleh terdapat pelbagai paham politik...dan kalau datang marabahaya yang menimpa pergerakan di sanalah tempat kita menunjukkan persatuan hati, di sanalah kita harus berdiri sebaris...kita menyusun ‘persatuan’...kita menolak ‘persatén’...”. Daulat Ra’jat, 20 April 1932.

sesama warganegara. Oleh karena itu Pancasila adalah “*asas bersama*” bagi seluruh warganegara yang *bhinneka*, menjadikannya identitas bangsa.

Dengan demikian Pancasila mentransformasi *kebhinnekaan* menjadi *ketunggalikaan*, tanpa masing-masing yang beraneka itu kehilangan keunggulan dan kekhasan spesifiknya.

Ada benarnya sebagian dari kita menegaskan bahwa Pancasila di samping merupakan nilai budaya, identitas bangsa, filsafat negara dan ideologi nasional, Pancasila merupakan *platform* nasional yang dengan penuh toleransi diterima semua agama sebagai konsensus nasional.

Pancasila adalah “paham persatuan” sekaligus “kebijakan nasional” untuk mempertahankan persatuan nasional.

Satu Sistem Pendidikan Nasional

Dengan berhati-hati dan bijak kita perlu menyadari bahwa hingga saat ini masalah persatuan Indonesia belum terselesaikan, bahkan masalah disintegrasi nasional saat ini menjadi isu nasional penuh kerawanan.

Pasal 31 UUD 1945 ayat (2) menegaskan:

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang”.

Pasal 32 UUD 1945:

“Pemerintah memajukan kebudayaan nasional Indonesia”.

Dengan penjelasan: *“Kebudayaan bangsa ialah kebudayaan yang timbul sebagai buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya.”*

Kebudayaan lama dan asli yang terdapat sebagai puncak-puncak kebudayaan di daerah-daerah di seluruh Indonesia terhitung sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus menuju ke arah kemajuan adab, budaya, dan

persatuan, dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan asing yang dapat memperkembangkan atau memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi derajat kemajuan bangsa Indonesia”.

Satu sistem pendidikan nasional tentulah memerlukan satu sistem evaluasi nasional. Karena itulah maka Indonesia memberlakukan Ujian Nasional.

Sejajar dengan pelaksanaan UN adalah pentingnya membentuk berbagai “satu kesatuan nasional” yang solid dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, demi memperkukuh integrasi dan kohesi nasional di negeri yang pluralistik dan multi-kulturalistik ini.⁵⁾ Perlu ditegaskan *satu* pandangan hidup bangsa dan *satu* dasar negara, yaitu Pancasila; *satu* konstitusi Negara, yaitu UUD 1945; *satu* identitas Negara, yaitu bendera Sang Merah Putih/lambang Negara Garuda Pancasila/lagu kebangsaan Indonesia Raya; *satu* bahasa persatuan, yaitu Bahasa Indonesia; *satu* kesatuan militer, yaitu TNI dengan *satu sistem* NRP-nya; *satu* Kepolisian Negara dengan *satu sistem* NRP-nya; *satu* PNS dengan *satu sistem* NIP-nya; *satu* alat tukar nasional, yaitu Rupiah; *satu* sistem fiskal, dengan *satu sistem* NPWP-nya; *satu sistem* pos dengan *satu sistem* kode pos-nya, dst, dst.⁶⁾

Hidup berkelanjutannya Republik Indonesia ini karena Pancasila sebagai Dasar Negara mentransformasi *kebhinnekaan* nasional kita menjadi *ketunggalikaan* dalam berbangsa dan bernegara. Sekali lagi, Pancasila-lah yang membuat manusia Indonesia yang berbeda-beda ini bisa mempunyai kesamaan mendasar, memiliki rasa bersama, memiliki ruh yang satu dan

⁵⁾ Lihat Meutia Hatta, *Antropologi dan Integrasi Nasional*, Pidato Pengukuhan Guru Besar Tetap Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 25 Maret 2006.

⁶⁾ Meutia Hatta, *loc. cit.* Lihat pula Sri-Edi Swasono, *Keindonesiaan* (Yogyakarta: UST-Press, 2015), hlm. 91.

sama, yaitu Pancasila. Dengan rasa bersama dan ruh yang sama maka “persatuan” tidak sekedar merupakan “persatén”. Kemudian tersimpulkan bahwa Pancasila adalah eksistensialisme Indonesia. Menceraikan Indonesia adalah menyingkirkan Pancasila dalam kurikulum nasional.

Tentu UN menempati posisi penting untuk mensosialisasikan Pancasila di hati seluruh anak negeri, mensosialisasikan ketanah-airan Indonesia (ilmu bumi dan sejarah), mensosialisasikan keindonesiaan (nilai-nilai sosial-kultural), mensosialisasikan satu Ibu Pertiwi sebagai satu-satunya tempat mengabdikan.

Proklamasi Kemerdekaan adalah Proklamasi Budaya

Proklamasi Kemerdekaan adalah suatu Proklamasi Politik yang menegaskan bahwa “Merdeka” adalah “mandiri”. Dengan kata lain Proklamasi Kemerdekaan adalah pula Proklamasi Kemandirian, yang ditegaskan sebagai *onafhankelijkheid proclamatie*.

Artinya “pernyataan kemerdekaan” adalah suatu “pernyataan budaya”, yaitu pernyataan untuk memangku nilai-nilai budaya berdaulat, melepaskan diri dari ketergantungan – kemampuan berbudaya *onafhankelijk* untuk menolak ketergantungan, menolak perhambaan sebagai “*Koelie* di Negeri Sendiri”, sekaligus yang berketeguhan untuk tidak ragu menjadi “Tuan di Negeri Sendiri”. Kesemuanya merupakan pernyataan budaya untuk meninggalkan ketertundukan, melepas servilitas dan *underdog mentality*-nya kaum *Inlander*. Oleh karena itu pendidikan karakter anak bangsa di ruang-ruang kelas merupakan tuntutan urgen.⁷⁾

⁷⁾ Bolehkanlah pula bahwa di lingkungan kaum nasionalis, tak terkecuali tentunya Tamansiswa, kita mengutamakan dan menuntut pendidikan karakter.

Lebih lanjut mengenai makna pernyataan kemerdekaan sebagai pernyataan budaya, salah satu bentuknya adalah tuntutan untuk merubah diri sendiri yang di masa jajahan merupakan kaum *Inlander*, dengan menegaskan kesetaraan nondiskriminatori. Lalu menyadari bahwa Indonesia Merdeka

Saya selaku Ketua Umum Tamansiswa mencoba mengeksplisitkannya sebagai berikut:

- Diawali dengan karakter (*mindset*) cinta kepada *Ibu Pertiwi*, cinta kepada *Sang Merah Putih*, menghayati *Bhinneka Tunggal Ika – Tanhanna Dharma Mangrwa*, setia pada *Pancasila*.
- Pendidikan untuk membentuk dan mempertegas *jati-diri*, *harga-diri* dan *percaya-diri*.
- Pendidikan membentuk sikap *jujur*, *berani*, *berdisiplin*.
- Pendidikan mempertegas *iman*.
- Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya *saling menghormati*, *ber-unggah-ungguh*, *ber-sopan-santun*.
- Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan *persatuan dan kerukunan* serta *ber-toleransi*, *menghormati* dan *menghargai perbedaan*.
- Pendidikan mengajarkan dan mencontohkan pentingnya bersahabat, ramah, tolong-menolong (*friendly*) dan menghargai *friendliness*.
- Pendidikan membentuk sikap sabar, mampu mengendalikan emosi.
- Pendidikan menumbuhkan kepekaan estetika dan artistika untuk membentuk sikap kritis, apresiatif dan kreatif.
- Pendidikan membentuk karakter tangguh sebagai bangsa menjadi *ber-harkat-martabat*, *ber-jati-diri* (*Gestalt* keindonesiaan), *digdaya* dan *mandraguna* dalam rangka *nation and character building*.
- Pendidikan untuk memperkuat rasa Kebangsaan (nasionalisme, berkarakter cinta Ibu Pertiwi) dan memperkuat rasa Kerakyatan (bahwa tahta adalah untuk rakyat).
- Pendidikan memantapkan kesadaran geografis (*territorial awareness*) untuk mengenal keberadaan diri/*ground zero* dan kesadaran sejarah (*survival awareness*) untuk memperkuat jati-diri bangsa.
- Pendidikan “mencerdaskan kehidupan bangsa” (konsepsi budaya), tidak sekedar untuk “mencerdaskan otak bangsa” (konsepsi biologis-genetika), menghilangkan ke-*minderwaardig-an* (*servility*, *rendah-diri*, *underdog mentality*).
- Pendidikan mengangkat kemampuan bangsa untuk *proaktif* ikut mendesain masa depan dunia.
- Pendidikan untuk mendorong proses “modernisasi”, yang tidak identik dengan “westernisasi”, tetapi sebaliknya modernisasi adalah untuk mempertegas keindonesiaan.
- Pendidikan untuk membudayakan nilai-nilai Pancasila.
- Mampu menjadi pemimpin: mampu *ing ngarso sung tulodho*, *ing madya manguk karso*, *tutuwuri handayani*.

dalam konstitusinya menegaskan doktrin humanistik yang emansipatori. Dengan kata lain, *égalité* sebagai tuntutan peradaban mulia telah kita kawal sejak awal kemerdekaan kita ditegaskan di situ dalam konteks keluhuran emansipasi dan humanisme.

Lagi-lagi terbukti sulit melaksanakan tuntutan budaya merdeka di atas, tidak mudah melakukan *cultural unlearning* fundamental semacam itu. Seperti kita lihat kita tetap minder sebagai *Inlander*, tetap mudah kagum terhadap yang serba *western* berikut gebyar-gebyar globalisasi yang menyertainya. Sebagian terbesar dari kita tetap saja merasa sebagai *eine Nation von Kuli und Kuli unter den Nationen* – bangsa kuli dan kulinya bangsa-bangsa lain. Akibatnya “modernisasi” sering diartikan sebagai “westernisasi”, bahkan kadang-kadang diartikan sebagai tuntutan “eksklusivisasi parokhial” yang justru mengutuk modernisme dan mendekatkan pada puritanisme fundamental yang *suicidal*.

Kesadaran-kesadaran berdaulat, mandiri, berharkat-martabat, berkehidupan cerdas, tidak sekedar berotak cerdas, tangguh, digdaya, dan mandraguna, merupakan “tuntutan budaya” yang harus kita penuhi sebagai bangsa yang telah berani menyatakan kemerdekaannya. Namun kiranya kita telah gagal melakukan proses *unlearning* (*aanleren*), gagal melepas *mindset* tekuk-lutut, dan juga lengah menggariskan strategi budaya dalam pembangunan nasional kita untuk dapat memenuhi “tuntutan budaya” (dan “tugas budaya”) fundamental ini.

Kita bahkan lengah-budaya dengan menerima kembali liberalisme dan kapitalisme yang justru kita tolak tatkala kita menyatakan Kemerdekaan. Kita membiarkan pembangunan nasional hanya mengejar “nilai-tambah ekonomi” yang artinya hanya mengejar untuk “*to have more*”, lupa mengejar pula “nilai-tambah sosial-kultural” agar mampu menjadi “*to be more*”,

mampu meraih nilai-tambah ketahanan dan kemartabatan bangsa kita, sekaligus memampukan diri kita masing-masing menjadi orang berpekerti luhur, ibarat “*priyayi ing lampah lan lathi*”.

Akibatnya pembangunan nasional hanya menghasilkan pertumbuhan *GDP*, itu pun cuma 4,5 % disertai dengan jurang kaya miskin yang makin melebar.

Pembangunan seharusnya mengutamakan “daulat rakyat”, bukan mengutamakan “daulat pasar”-nya neoliberalisme dan kapitalisme. Selanjutnya kita kehilangan kedaulatan nasional: kita tidak berdaulat dalam pangan, bibit, obat dasar, teknik industri, ekspor-impor, energi, teknologi, pertahanan, tataguna bumi/air/kekayaan alam, bahkan kita tidak berdaulat dalam legislasi yang serba mengerikan. Bagaimana ketakberdaulatan dan keterjajahan ini bisa terjadi? Lalu apa sebenarnya yang kita ajarkan di ruang-ruang klas anak-anak kita, menjadi salah asuhankah para sarjana-sarjana pendidikan tinggi kita di Indonesia?

Apa itu Kemandirian?

“...Kemandirian adalah suatu sikap atau mindset, sikap berdikari menolak ketergantungan nasib-sendiri pada pihak lain, sikap menolak subordinasi, menolak pengemisan. Kemandirian adalah kepahlawanan. Kemandirian adalah suatu percaya-diri dan kebanggaan-diri untuk mampu memutuskan sendiri apa yang terbaik bagi dirinya, suatu prestasi-diri menolak ketertundukan atau ketertekuklututan. Mandiri adalah tuntutan kesetaraan. Mandiri adalah harga-diri, merubah sikap menghamba (*servile*) dan minderwaardig menjadi kedigdayaan....

Ketika mandiri diangkat ke tingkat Bangsa dan Negara, maka kemandirian adalah doktrin nasional, doktrin untuk

merdeka dan berdaulat, untuk mengutamakan kepentingan Nasional, yaitu kepentingan Rakyat, Bangsa dan Negara. Kemandirian nasional menolak supremasi dan dominasi mancanegara, tetapi bukan xenophobic atau anti-asing. Pada tingkat ini Negara menolak dependensi tetapi mengambil manfaat dari interdependensi global. Untuk itu kita proaktif ikut mendesain mekanisme dan wujud globalisasi. Kemandirian adalah sikap dan perilaku bebas-aktif...".⁸⁾

Kemandirian nasional adalah inti dari kemerdekaan nasional dan kedaulatan nasional. Oleh karena itu nasionalisme atau paham kebangsaan adalah sikap budaya. Nasionalisme tidak pernah usang. Pandangan mengenai "the end of nation-state"⁹⁾, kemudian dilanjutkan ke pandangan mengenai "the borderless-world"¹⁰⁾, bahkan juga "the end of History"¹¹⁾, tidak saja merupakan upaya ideologis kaum imperialis global tetapi juga merupakan perang ideologi¹²⁾, tetapi juga adalah perang ide atau

⁸⁾ Diangkat dari Sri-Edi Swasono, *Kembali Ke Pasal 33 UUD 1945: Menolak Neoliberalisme* (Jakarta: Yayasan Hatta, 2010), hlm. 126.

⁹⁾ Kenichi Ohmae, *The End of Nation-State: The Rise of Regional Economies, How New Engines of Prosperity are Reshaping Global Markets* (New York: The Free Press, 1995).

¹⁰⁾ Kenichi Ohmae, *The Borderless-World: Power and Strategy in the Interling Economy* (New York: Harper Collins, 1991).

¹¹⁾ Francis Fukuyama, *The End Of History and The Last Man* (New York: The Free-Press, 1992).

¹²⁾ Susan George menggambarkan pula betapa sengitnya perang ide dan perang ideologi itu berjuang keras menyebarkan neoliberalisme dan mempertahankan kapitalisme global, yang dibiayai oleh korporasi-korporasi dan yayasan-yayasannya secara besar-besaran, memasuki dunia kampus dan lembaga-lembaga penelitian terhormat, "membeli" para intelektual dan editor-editor majalah terkemuka, mengadakan perdebatan-perdebatan artifisial yang direkayasa dan dimuat di *New York Times*, *Washington Post* dan *Time Magazine*. IMF, The World Bank, WTO ikut dalam perang ide ini, sebagai bagian dari pabrik ideologi neoliberalisme. Bagi kita mengabaikan ekonomi rakyat dan deindustrialisasi sekedar demi WTO adalah kelengahan kultural dan akademis yang sangat parah. Lebih dari itu Susan George menggambarkan pula bengisnya neoliberalisme di Amerika Serikat, apalagi terhadap negara-negara berkembang, melalui korporasi-korporasi dan lembaga-lembaga internasional pendukungnya, lihat Susan George, *Republik Pasar Bebas*, terjemahan (Jakarta: INFID/Bina Rena Pariwisata, 2002), hlm. 75-101.

perang budaya (*neocortical warfare – the war of mindset*), yang dahsyat.

Nasionalisme memang rentan terhadap globalisasi sebagai topeng dari neoliberalisme imperialistik.¹³⁾

Ekspresi-ekspresi nasionalisme tetap bergaung keras, bahkan barangkali sepanjang masa, saya kutipkan contoh-contoh sebagai berikut:

Mpu Tantular (Abad 14): "*Bhinneka Tunggal Ika, Tan Hanna Dharma Mangrwa*"¹⁴⁾ (Beraneka namun satu jua, tiada loyalitas ganda). – Artinya loyalitas hanya kepada Ibu Pertiwi, Tanah-Air Indonesia.

Ibn Khaldun (akhir Abad 14): "...sebuah negara akan mencapai kesuksesan dan kemakmuran jika ada jiwa nasionalisme yang kuat...".

¹³⁾ Banyak pandangan dan definisi mengenai globalisasi. Akan saya gambarkan sebagai berikut:

"...Dalam keadaan dunia semakin terglobalisasi... akan terjadi perusakan serius terhadap kesadaran diri pada tingkat peradaban, kemasyarakatan dan etnis..." (*Huntington, 1996*). "...Globalisasi adalah nama lain untuk dominasi Amerika..." (*H. Kissinger, 1998*). "...Dari segi kultural globalisasi telah cenderung meliputi meluasnya (demi perbaikan ataupun pemburuan) Amerikanisasi...globalisasi adalah penyebaran kapitalisme pasar-bebas nyaris ke setiap negara di dunia...globalisasi merubah semua teman maupun musuh menjadi kompetitor-kompetitor..." (*Thomas Friedman, 2001*). "...Dunia akan memiliki ekonomi global tanpa pemerintahan global... saat ini kita memiliki ekonomi global tanpa masyarakat global..." (*G. Soros, 1998*). "...Globalisasi adalah imperialisme ekonomi baru..." (*Petrus & Veltmeyer, 2001*). Tetapi globalisasi tidak lagi sekedar suatu proses dominasi Amerika ataupun Amerikanisasi yang sederhana, "...globalisasi telah menciptakan perang dagang..." (*Krugman, 2001*), bahkan saat ini, "...telah dengan parah mengakibatkan perang mata uang global yang mencemaskan..." (*Swasono, 2010*). "...Cara bagaimana globalisasi telah ditatalaksana...perlu secara radikal dipikirkan ulang... membuat globalisasi bekerja merupakan langkah-langkah berikutnya untuk memujudkan keadilan global..." (*Stiglitz, 2007*), atau, sebagaimana kita saksikan adalah "...ekonomi terjun bebas made in Amerika... tentang pasar-bebas dan tenggelamnya ekonomi dunia..." (*Stiglitz, 2010*). Dalam brutalitas pasar-bebas saat ini kebenaran tibanya jaman pertengahan terbukti: "Asu gedhé menang kerahé" – anjing besar memenangkan pertarungan.

¹⁴⁾ Tan Hanna Dharma Mangrwa tertulis pada logo LEMHANNAS.

Johann Christoph Friedrich von Schiller (Abad 18): "Kita mau menjadi bangsa yang bersatu-padu, takkan terpisah-pisah dalam bahaya maupun sengsara, kita ingin menjadi merdeka seperti leluhur kita, memilih mati daripada hidup sebagai budak, kita bertaqwa kepada Tuhan, tak gentar akan kuasa manusia..."

Patrick Henry (1775): (Prajurit Amerika dalam Perang Kemerdekaan Melawan Inggris), "...Give me liberty or give me death..." (Berilah kami kemerdekaan atau kami memilih mati).

Ernest Rénan (pertengahan Abad 19): "...Apa itu nasionalisme? *Le desir d'être ensemble...*" (Hasrat sungguh-sungguh untuk bersatu).

Otto Bauer (akhir Abad 19): "...Was ist eine nation? Eine Nation ist eine aus Schicksalgemeinschaft erwachsene Charaktergemeinschaft...". (Suatu bangsa ialah suatu masyarakat ketertiban yang muncul dari masyarakat yang senasib).

Rene de Clercq (awal Abad 20): "...hanya satu negeri yang menjadi negeriku. Ia tumbuh dari karya, dan karya itu adalah usahaku..." (dikutip Bung Hatta dalam pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928).

Nasionalisme Jerman (1920-an): "...Deutschland über Alles... du bist Nichts, deine Volks ist Alles...". (Jerman di atas semuanya, anda bukan apa-apa, Bangsa Anda-lah yang segala-galanya).

Mohammad Hatta (1928) pada usia 25 tahun, sambil berdiri menuding Majelis Hakim: "...lebih baik Indonesia tenggelam ke dasar lautan daripada menjadi embel-embel bangsa lain..." (Pembelaan di Pengadilan Den Haag, 9 Maret 1928).

Ki Hadjar Dewantara (1928): "...Pengajaran harus bersifat kebangsaan ... Kalau pengajaran bagi anak-anak tidak berdasarkan kenasionalan, anak-anak tak mungkin mempunyai rasa cinta bangsa dan makin lama terpisah dari bangsanya, kemudian barangkali menjadi lawan kita..."

Soekarno (1930): "...imperialisme berbuahkan 'negeri-negeri mandat', 'daerah pengaruh'... yang di dalam sifatnya 'menaklukkan'

negeri orang lain, membuahkan negeri jajahan... syarat yang amat penting untuk perbaikan kembali semua susunan pergaulan hidup Indonesia itu ialah Kemerdekaan Nasional..." (Pembelaan di Pengadilan Bandung).

Jenderal MacArthur (Perang Dunia II): "...In war there is no substitute for victory..." (Dalam perang kemenangan tidak tergantikan).

Cornel Simanjuntak (1945): "Maju tak gentar membela yang benar, maju tak gentar hak kita diserang, maju tak gentar mengusir penyerang, maju tak gentar tentu kita menang".

Pemuda-pemuda Indonesia dalam Perang Kemerdekaan (1945-1948): "...Merdeka atau mati..."

Panglima Besar Soedirman (1949): "...pantang menyerah, lebih baik hancur lebur bersama debu kemerdekaan daripada menyerah di bawah penjajahan..."

Kusbini (1950-an): "Padamu negeri kami berjanji, padamu negeri kami berbakti, padamu negeri kami mengabdikan, Bagimu negeri jiwa raga kami".

John F. Kennedy (1961): "Jangan tanya apa yang bisa negara berikan untuk kalian; tanyalah apa yang bisa kalian berikan untuk negara".

Joan Robinson (1962): "... Ilmu ekonomi sebenarnya berakar pada nasionalisme ... Aspirasi negara berkembang lebih tertuju pada tercapai dan terpeliharanya kemerdekaan serta harga diri bangsa daripada sekadar untuk makan ... Para penganut mazhab klasik menjagoi perdagangan bebas dengan alasan bahwa hal ini menguntungkan bagi Inggris dan bukan karena bermanfaat bagi seluruh dunia..."

Ho Chi Minh (awal 1970-an): "...Kami akan menang perang... kami mempunyai senjata rahasia, yaitu nasionalisme..."

George Soros (1981): "...to abolish the existence of states neither feasible nor desirable..."

Sartono Kartodirdjo (2000): *"...Nasionalisme bukan proyek (bukan 'imagined nation'-nya Ben Anderson)... nasionalisme adalah semangat kemandirian dan persatuan bangsa sebagaimana ditegaskan oleh Manifesto Politik Perhimpunan Kedauletan 1925..."*.

Leah Greenfeld (2001): *"...Nasionalisme tidak menghilang, dan bahkan tidak menunjukkan tanda-tanda akan segera menghilang... ciri-ciri pertumbuhan yang berkesinambungan dari suatu perekonomian modern ternyata tidak berlangsung secara berkelanjutan dengan sendirinya (tidak self-sustained), tetapi pertumbuhan hanya akan berkelanjutan jika didorong dan ditopang oleh nasionalisme ..."*.

Ian Lustic (2002): *"...Nasionalisme merupakan suatu kekuatan pembangunan yang tak ada tandingannya di dunia masa kini..."*.

Meutia Hatta (2006): *"...Ketika bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya dengan segala alasan dan tuntutan yang rasional dan sah, tidak ada hal lain bagi kita kecuali untuk mempertahankannya tanpa lelah. Nasionalisme tidak saja indah, memberikan harga-diri, percaya-diri dan jati-diri, tetapi juga harus disyukuri sebagai karunia Tuhan..."*.

HAR Tilaar (2009): *"...Nasionalisme dalam masyarakat Indonesia perlu digalakkan kembali apabila kita ingin memelihara tetap hidupnya bangsa dan negara Indonesia..."*.

Widjojo Soejono (2011): *"...negara-bangsa merupakan dan akan tetap menjadi wujud realistik dan final dari institusi manusia di muka bumi... kewaspadaan adalah harga kemerdekaan yang setiap nasionalis siap untuk membayarnya..."*.

Penutup

Proklamasi kemerdekaan di samping merupakan "proklamasi budaya" seperti dikemukakan di atas, akhirnya dapat disimpulkan pula sebagai tuntutan nasionalisme Indonesia, tuntutan akan "kebangsaan Indonesia". Di sinilah perlu lahir semangat kebangsaan dan "bangsawan-bangsawan" tangguh untuk mem-

pertahankan kemerdekaan. "Bangsawan" di sini bukanlah tokoh berdarah biru, keturunan para ningrat dan Tuanku Diraja, bangsawan adalah orang yang mencintai dan memuliakan Bangsaanya.

Untuk itu barangkali kita perlu memiliki "kaidah kebangsaan" (kaidah nasionalisme) yang harus kita bumikan di lapangan.

Saya usulkan sebagai berikut:

(1). Harus kita sadari bahwa tujuan kita adalah melaksanakan "pembangunan Indonesia" bukan membiarkan terjadinya sekedar "pembangunan 'di' Indonesia". Kita bukan penonton pembangunan di negeri kita sendiri, dan membiarkan orang mancanegara yang membangun Indonesia, kita harus memupuk sendiri "pengalaman membangun", dan tidak teraleneasi dari proses pembangunan; (2). Kita membangun untuk menegaskan menjadi "Tuan di negeri sendiri", bukan menjadi "Kuli Inlander di negeri kita sendiri"; (3). Kita mengutamakan "kepentingan nasional" tanpa mengabaikan tanggungjawab global; (4). Kita tidak *xenophobic* yang anti asing, namun ekonomi asing tidak boleh mendominasi ekonomi nasional; (5). Kita adalah bangsa yang ramah, kita menyukai "kerjasama" dengan manca-negara manapun, bersamaan itu kita harus menegaskan bahwa "kerjasama" dengan pihak mancanegara manapun bukan ajang untuk mengorbankan "kepentingan nasional" apalagi "kedaulatan nasional"; (6). "Daulat rakyat" adalah doktrin nasional kita yang harus ditegakkan dan tidak boleh digusur oleh "daulat pasar"; (7). Diktum politik luar negeri kita adalah "bebas-aktif" sebagai landasan untuk senantiasa mengutamakan kemandirian, keberdaulatan dan kepentingan Bangsa dan Negara.

Surakarta, 7 Maret 2017

Lampiran

**Bhinneka Tunggal Ika – Tanhana Dharma Mangrwa:
DAFTAR SUKUBANGSA-SUKUBANGSA DI INDONESIA
(SELURUH INDONESIA, 27 PROVINSI, 1995)
Disusun oleh: Sri Edi Swasono**

1. Bali: (4)

Bali, Loloan, Nyama Selam, Trunyan.

2. Bengkulu: (9)

Bengkulu, Enggano, Kaur, Lembak, Muko-Muko, Pekal, Rejang, Serawai, Suban.

3. D.I. Aceh/NAD: (11)

Aceh, Alas, Aneuk Jamee, Gayo, Gayo-Lut, Gayo Lues, Gayo Serbejadi, Kluet, Simeulu, Singkil, Tamiang.

4. DIY: (1)

Yogyakarta.

5. DKI: (1)

Betawi

6. Irian Jaya: (109)

Aero, Airo Sumaghaghe, Airoran, Ambai, Amberboken, Amungme, Anu, Arfak, Asmat, Auyu, Ayfat, Baso, Baudi, Berik, Bgu, Biak, Borto, Buruai, Citak, Damal, Dani, Dem, Demisa, Demta, Dera, Edopi, Eipomek, Ekagi, Ekari, Emumu, Eritai, Fau, Foau, Gebe, Gresi, Hattam, Humboldt, Hupla, Inanwatan, Irarutu, Isirawa, Iwur, Jaban, Jair, Kaburi, Kaeti, Kais, Kalabra, Kamberau, Kamoro, Kapauku, Kapaur, Karon, Kasuweri, Kaygir, Kembrano, Kemtuk, Ketengban, Kimaghama, Kimyal, Kokoda, Kmnai, Korowai, Kupol, Kurudu, Kwerba, Kwesten, Lani, Maden, Mairasi, Mandobo, Maniwa, Mansim, Manhuke, Marind Anuim, Maiyakh, Mey Brat, Mimika, Moire, Mombum, Moni, Mooi, Mosena, Murop, Muyu, Nduga, Ngnalik, Ngnalum, Nimboran, Palamul, Palata, Pisa, Sailolof, Samarokena, Saprang, Sawung, Sawuy, Sentani, Silimo, Tabati, Tehid, Timorini, Uruwai, Waipam, Waipu, Wamesa, Wanggom, Wano, Waris, Waropen, Wodani, Yahray, Wali, Yapen, Yaqay, Yei.

7. Jambi: (6)

Anak Dalam, Batin, Jambi, Kerinci, Pengkulu, Pindah.

8. Jawa Barat: (5)

Baduy, Banten, Cirebon, Naga, Sunda.

9. Jawa Tengah: (5)

Bagelen, Banyumas, Jawa, Nagariung, Samin.

10. Jawa Timur: (6)

Bawean, Jawa, Madura, Surabaya, Tengger, Osing.

11. Kalimantan Barat: (71)

Babak, Badat, Barai, Bangau, Bukit, Cempedek, Dalam, Darat, Darok, Desa, Dusun, Embaloh, Empayuh, Engkarong, Ensanang, Entungau, Galik, Gun, Iban, Jangkang, Kalis, Kantuk, Kayan, Kayanatan, Kede, Kendayan, Keramai, Klemantan, Kopak, Koyon, Lara, Limbai, Maloh, Mayau, Mentebak, Menyangka, Menyanya, Merau, Mualang, Muara, Muduh, Muluk, Ngabang, Ngalampa, Ngamukit, Nganayatn, Panu, Pengkedang, Pompang, Pontianak, Pos, Punt, Randuk, Ribun, Sambas, Sanggau, Sani, Seberuang, Sekajang, Selayang, Selimpat, Senangkan, Senunang, Sisang, Sintan, Suhaid, Sungkung, Suruh, Tabuas, Taman, Tingui.

12. Kalimantan Selatan: (10)

Abai, Bakumpai, Banjar, Beaki, Berangas, Bukit, Dusun Deyah, Harakit, Pagatan, Pitap.

13. Kalimantan Tengah: (10)

Bantian, Bawo, Lawangan, Maanyan, Ngaju, Ot Danum, Paku, Punan, Siang, Tamuan.

14. Kalimantan Timur: (29)

Auheng, Baka, Bakung, Basap, Benuaq, Berau, Berusu, Bem, Bulungan, Busang, Dayak, Huang Tering, Jalan, Kenyah, Kulit, Kutai, Long Gelat, Long Paka, Modang, Oheng, Pasir, Penihing, Saq, Seputan, Tidung, Timai, Tou, Tukung, Tunjung.

15. Lampung: (1)

Lampung.

16. Maluku: (51)

Alune, Ambon, Aru, Babar, Bacan, Bajoe, Banda, Buli, Buru, Galela, Gane, Gebe, Halmahera, Haruku, Jailolo, Kao, Kei, Kisar, Kur, Laloda, Leti, Lumoli, Maba, Makian, Mange, Mare, Memalu, Moa, Modole, Morotai, Nualulu, Pagu, Patani, Pelauw, Rana, Sahu, Sanana, Sawai, Seram, Siboyo, Sula, Tanimbar, Ternate, Tidore, Tobaru, Tobelo, Togutil, Wai Apu, Wai Loa, Weda, Wemale.

17. Nusa Tenggara Barat: (9)

Bayan, Bima, Dompu, Donggo, Kore, Mata, Mbojo, Sasak, Sumbawa.

18. Nusa Tenggara Timur: (48)

Abui, Alor, Anas, Atanui, Atoni, Babui, Bajawa, Bakifan, Blagar, Boti, Dawan, Deing, Ende, Faun, Flores, Hanifeto, Helong, Kabola, Karera, Kawel, Kedang, Kemak, Kemang, Kolana, Kramang, Krowe Muhan, Kui, Labala, Lamaholot, Lemma, Lio, Manggarai, Marae, Maung, Mela, Modo, Muhan, Nagekeo, Ngada, Moenleni, Riung, Rongga, Rote, Sabu, Sikka, Sumba, Tetun.

19. Riau: (9)

Akit, Hutan, Kuala, Kubu, Laut, Lingga, Riau, Sakai, Talang Mamak.

20. Sulawesi Selatan: (13)

Abung Bunga Mayang, Bentong, Bugis, Daya, Duri, Luwu, Makassar, Mandar, Massenrengkulu, Selayar, Toala, Toraja, Towala-wala.

21. Sulawesi Tengah: (25)

Bada, Bajau, Balaesang, Balantak, Banggai, Bungku, Buol, Dampelas, Dondo, Kaili, Muna, Mekongga, Mori, Napu, Pamona, Pipikoro, Saluan, Sea-sea, Tajio, To Laki, Toli-Toli, Tomia, Tomini, Wakatobi, Wawoni.

22. Sulawesi Tenggara: (9)

Buton, Cina, To Laiwiu, To Landawe, To Mapute, Orang Butung, Orang Lajolo, Orang Muna, Moronene.

23. Sulawesi Utara: (20)

Bantik, Bintauna, Bolaang Itang, Bolaang Mongondow, Bolaang Uki, Borgo, Gorontalo, Kaidipang, Minahasa, Mongondow, Polahi, Ponosakan, Ratahan, Sangir, Talaud, Tombulu, Tonsawang, Tonsea, Tontemboan, Toulour.

24. Sumatra Barat: (2)

Mentawai, Minangkabau.

25. Sumatra Selatan: (29)

Ameng Sewang, Anak Dalam, Bangka, Belitung, Enim, Kayu Agung, Kikim, Kisam, Komering, Lahat, Lematang, Lintang, KLOm, Mapur, Meranjat, Musi Banyuasin, Musi Rawas, Musi Sekayu, Ogan, Palembang, Pasemah, Pedamaran, Pegagan, Rambang Senuling, Ranau, Rawas, Saling, Sekak, Semendo.

26. Sumatra Utara: (15)

Angkola, Asahan, Batak, Dairi, Deli, Karo, Langkat, Mandailing, Nias, Pakpak, Pesisir Natal, Siladang, Sumalungun, Toba, Ulu Muara Sipongi.

27. Timor Timur: (2)

Ilimano, Timor Timur.

Referensi Utama:

Melalatoa, M. Junus, *Ensiklopedi Sukubangsa di Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, 1995).

Referensi Lain:

Geerland, G., *Atlas der Volkerkunde* (Gottra: Berhaus, Heinich, 1893).

Koentjaraningrat, *Atlas Etnografi Sedunia* (Jakarta: Penerbit Dian Rakjat, 1969).

Ter Haar, B., *Adat Law in Indonesia* (New York: Institute of Pacific Relations, 1948).